

Analisis Pengembangan Wisata dengan Konsep *Community Based Tourism* Melalui Persepsi Masyarakat di Desa Semangat Gunung-Daulu, Kabupaten Karo

Simon Hadi Bangun¹, Joko Adiarto²

¹Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Indonesia, simonhadibangun99@gmail.com

²Departemen Arsitektur, Universitas Indonesia, joko.adiarto@ui.ac.id

ABSTRAK

Kawasan Destinasi Pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya merupakan salah satu destinasi wisata di kabupaten Karo. Salah satu daya tarik pariwisata yang dimiliki kawasan ini adalah pemandian air panas yang memiliki kandungan belerang. Pengembangan pariwisata di kawasan ini ditemukan pro dan kontra di masyarakat terhadap aktivitas pariwisata yang sering membuat terjadi adanya tidak sinergitas dalam pembangunan pariwisata. Sehingga, salah satu konsep wisata yang dapat diterapkan kepada masyarakat yang berada di wilayah perdesaan adalah konsep *community based tourism*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan wisata berkonsep CBT melalui persepsi masyarakat berdasarkan indikator-indikator dimensi model CBT di Desa Semangat Gunung-Daulu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi dan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat, kemudian dilakukan kodefikasi untuk menemukan kategori maupun kata kunci yang sesuai dengan indikator-indikator dimensi model CBT. Hasil penelitian mengidentifikasi pariwisata di Desa Semangat Gunung-Daulu ditemukan peluang untuk dapat diimplementasikan dengan konsep CBT antara lain pada dimensi ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga ketiga dimensi tersebut diketahui sudah optimal dilakukan meskipun masih diperlukan evaluasi. Pada dimensi lingkungan dan politik, masing-masing indikator penting untuk dievaluasi dan dikembangkan karena masih hal baru bagi kawasan tersebut. Sehingga, perlu peran tenaga ahli yang profesional dan keputusan politik yang kuat di masyarakat agar dapat mengimplementasikan setiap kebijakan untuk pengembangan pariwisata. Hasil dari penelitian ini merupakan persepsi masyarakat, sehingga hasilnya diketahui menjadi harapan masyarakat serta dapat memahami kemampuan dan kebutuhan di masyarakat sehingga dapat memperdayakan masyarakat dengan baik.

Kata Kunci: *Communitybased Tourism*, Persepsi Masyarakat

ABSTRACT

The Mount Sibayak Tourism Destination Area and its surroundings are one of the tourist destinations in Karo Regency. One of the tourist attractions in this area is the hot springs which contain sulfur. The development of tourism in this area has found pros and cons in the community regarding tourism activities which often results in a lack of synergy in tourism development, so that one tourism concept that can be applied to people in rural areas is the concept of community based tourism. The aim of this research is to analyze the development of tourism with a CBT concept through community perceptions based on indicators of the dimensions of the CBT model in Semangat Gunung-Daulu Village. This research uses qualitative methods by conducting observations and interviews with various parties involved, then coding is carried out to find categories and keywords that match the dimensional indicators of the CBT model. The results of the research identified tourism in Semangat Gunung-Daulu Village and found opportunities to be implemented with the CBT concept,

including in the economic, social, and cultural dimensions, so that these three dimensions are known to be optimal, although evaluation is still needed. In the environmental and political dimensions, each indicator is important to evaluate and develop because it is still new for the area so it needs the role of professional experts and strong political decisions in the community to be able to implement every policy for tourism development. The results of this research are the community's perceptions so that the results are known to be the community's hopes and can understand the abilities and needs of the community so that they can empower the community well.

Keywords: *Community Based Tourism, Public Perception*

*Naskah diterima: 14 Mei 2024, direvisi: 22 Juli 2024, diterbitkan: 15 Agustus 2024
DOI : <https://doi.org/10.37253/altasia.v6i2.9207>*

PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi visi kerja Pemerintah Kabupaten Karo yang tertera pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026. Kabupaten Karo memiliki beragam destinasi didalamnya salah satunya ekowisata pemandian air panas Semangat Gunung-Daulu yang berada di kawasan destinasi pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya. Destinasi tersebut berada di wilayah pedesaan, sehingga selaras dengan program (Kemenparekraf, 2022) mengenai destinasi untuk pengembangan desa wisata menjadi agenda pariwisata Indonesia (kemenparekraf.go.id, 2022). Hal ini, menjadi industri pariwisata yang memberikan nilai yang mampu menggerakkan perekonomian dan memberikan dampak kepada masyarakat dan desa.

Ekowisata kawasan pemandian air panas Semangat Gunung-Daulu memiliki lokasi yang strategis dengan berada di pintu masuk kabupaten Karo, sehingga menjadi sangat terjangkau menjadi tujuan wisata dari arah kota Medan. Namun, perkembangan pariwisata yang ada di kawasan tersebut diketahui ada beberapa isu yang beredar antara lain aktivitas pungutan liar setiap pos sepanjang jalur kawasan Daulu-Semangat Gunung, pemblokadean jalur menuju kawasan pemandian air panas oleh oknum masyarakat, dan krisis kepercayaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, perlu ada penyesuaian kepada masyarakat salah satunya melalui faktor

sosial dengan pengaruh adanya partisipasi dari masyarakat untuk menentukan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga mempengaruhi terhadap kualitas destinasi (Agustina et al., 2019). Hal ini sebagai bentuk untuk menyadarkan masyarakat menciptakan lingkungan yang ramah bagi wisatawan, sehingga membangun citra yang baik pada destinasi serta meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memahami pariwisata (Agustina et al., 2019; Timothy, 1999). Hal ini merupakan peran dari masyarakat sebagai sumber daya utama dalam pembangunan melalui proses pemberdayaan masyarakat dengan konsep pariwisata berbasis masyarakat/*community based tourism* (CBT) (Sulistiyadi et al., 2017, pp. 5–6). Melalui pendekatan ini, konsep CBT memberikan perhatian akan keterlibatan masyarakat untuk mendukung tercapainya pembangunan pariwisata, sehingga konsep CBT menjadi modal penting yang harus dijaga oleh ketiga komponen *stakeholder* (Agustina et al., 2019).

Pengembangan pariwisata dengan konsep CBT diarahkan untuk dapat memperbaiki kehidupan masyarakat melalui kontribusi terhadap pariwisata untuk kemakmuran destinasi dan masyarakat lokal (Sulistiyadi et al., 2017, p. 13). Masyarakat lokal diberikan kesempatan untuk terlibat dalam pariwisata, sehingga memperkuat kemampuan yang dimiliki untuk dapat mengelola sumber daya dan memantau partisipasi masyarakat (Nurhidayati & Fandeli, 2012; Pasaribu & Rachmawati,

2022) sehingga konsep CBT sangat penting untuk pengembangan pariwisata terutama di wilayah pedesaan.

Melansir dari berbagai studi *literature* yang dilakukan oleh penulis membahas tentang pariwisata berbasis masyarakat di berbagai destinasi di Indonesia. Konsep pariwisata berbasis masyarakat memberikan manfaat ke masyarakat lokal yang meningkatkan kualitas hidupnya serta membahas persoalan pada dimensi ekonomi dan sosial. Akan tetapi dalam penerapannya, konsep pariwisata berbasis masyarakat (CBT) memiliki dimensi lainnya seperti budaya, lingkungan, dan politik yang jarang dibahas pada penelitian sebelumnya untuk menemukan apa yang menjadi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Hal ini berpengaruh pada persepsi dan preferensi dari masyarakat lokal yang tinggal di destinasi, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami penerapan konsep CBT berdasarkan dimensi-dimensi tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Community Based Tourism (CBT)

Community Based Tourism (CBT) atau pariwisata berbasis masyarakat merupakan sebuah mekanisme dalam pembangunan berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan konservasi bagi masyarakat lokal yang tinggal di suatu destinasi sehingga CBT berpotensi untuk berkembang secara keterampilan, kelembagaan, dan memberdayakan masyarakat lokal (Putra et al., 2023). Konsep dan prinsip CBT menjadi sebuah pendekatan dalam perencanaan pariwisata di daerah yang memiliki destinasi (Putra et al., 2023).

Konsep dan prinsip CBT menjadi sebuah strategi pembangunan daerah melalui pariwisata, sehingga menjadi alat yang memperkuat komunitas lokal dari masyarakat “*untuk*” keberlangsungan “*dan*” meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal (Nurwanto, 2020). Konsep CBT menjadi salah satu konsep pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan keberlanjutan terhadap sosial, budaya, dan

lingkungan pada masyarakat lokal di destinasi (Nurwanto, 2020). Oleh karena itu, (Murphy, 1985) menjelaskan bahwa konsep CBT memiliki dampak penting bagi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan (*stakeholder*) di suatu destinasi pariwisata.

Konsep CBT memiliki tujuan untuk mengenalkan pariwisata kepada wisatawan dengan mengenalkan kehidupan masyarakat lokal untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat dan CBT menjalankan peranan masyarakat dalam pembangunan di bidang pariwisata dengan memberikan pengembangan, kualitas, dan pelayanan yang baik (Syarifah & Rochani, 2022). Pelaksanaan konsep CBT, masyarakat memiliki hak dan wewenang dalam pembangunan pariwisata di wilayahnya (Usman et al., 2022). Oleh karena itu, masyarakat sebagai pemain utama pembangunan pariwisata memiliki peran antara lain sebagai investor, evaluator, pemantau, pengelola, pelaksana, dan perencana (Maharani et al., 2021).

Pelaksanaan CBT tentunya memiliki prinsip yang menjadi aspek utama untuk dapat diimplementasikan dengan menggunakan panduan oleh UNEP dan WTO yang dikutip oleh (Suansri, 2003) antara lain: 1) dimensi ekonomi dengan indikator yaitu: adanya dana untuk pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan di sektor pariwisata, dan tumbuhnya pendapatan masyarakat lokal dari sektor pariwisata; 2) dimensi sosial dengan indikator yaitu: peningkatan kualitas hidup, peningkatan kebanggaan komunitas, pembagian peran yang adil, dan membangun organisasi manajemen komunitas; 3) dimensi budaya dengan indikator yaitu: mendorong masyarakat menghormati budaya lain, membantu perkembangan pertukaran budaya, dan menanamkan perkembangan dalam budaya lokal; 4) dimensi lingkungan dengan indikator yaitu: pembelajaran mengenai *carrying capacity*, manajemen pengelolaan sampah, dan kepedulian terhadap konservasi; 5) dimensi politik dengan indikator yaitu: adanya partisipasi masyarakat lokal,

peningkatan kekuasaan komunitas, dan hak dalam pengelolaan.

Participatory Terhadap Community Based Tourism

Wujud partisipasi masyarakat dalam memajukan sektor pariwisata merupakan model pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (CBT) (Rahayu et al., 2016). Hal ini sejalan dalam pengembangan pariwisata karena partisipasi masyarakat dalam konsep CBT dapat digunakan untuk memperluas dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki masyarakat baik secara individu ataupun kelompok (kelembagaan). Partisipasi masyarakat terhadap CBT menjadi fokus dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya wisata yang ada di destinasi tersebut. Sehingga, dalam konsep ini ditekankan kepada masyarakat untuk dapat mengambil keputusan, mengelola, dan memasarkan produk wisatanya (Asyifa et al., 2023).

Menurut (UNWTO, 2019) partisipasi masyarakat memiliki konsep-konsep antara lain transparansi, kesetaraan, pemberdayaan, keadilan, dan pemerataan yang terintegrasi dalam peraturan nasional dengan strategi pembangunan. Partisipasi masyarakat terhadap pariwisata berperan dalam pengetahuan dan transformasi proses pembelajaran dalam melayani pengembangan diri oleh masyarakat (Connell, 1997) dengan tujuan membentuk redistribusi kekuasaan yang memungkinkan masyarakat untuk mendistribusikan kembali manfaat yang diperoleh secara adil (Arnstein, 1969). Ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam CBT sebagai upaya untuk mengoptimalkan manfaat lokal dan mengurangi dampak negatif dari pariwisata oleh penduduk setempat, sehingga keterlibatan masyarakat menjadi kunci berhasilnya pengembangan CBT (Putra et al., 2023).

(Alfitri, 2014) menjelaskan jika keikutsertaan masyarakat secara sosial dan individu di lingkungan sekitar mampu memberikan manfaat yang besar. Hal ini sebagai wujud kesadaran dan kepedulian serta bertanggung jawab dari partisipan untuk memperbaiki mutu hidupnya. Tentunya ada

faktor-faktor yang mempengaruhi partisipan tersebut yaitu: 1) kesempatan berpartisipasi dalam hal usia, pekerjaan, penghasilan, dan tingkat pendidikan; 2) kemampuan berpartisipasi dalam hal memberikan ide dan tenaga; dan 3) kemauan berpartisipasi baik dari diri sendiri maupun dari luar. Sejalan dengan faktor tersebut, maka tahapan-tahapan dalam partisipasi terhadap CBT yaitu: 1) partisipasi dalam pengambilan keputusan; 2) pelaksanaan kegiatan; 3) pemantauan dan evaluasi pembangunan; dan 4) pemanfaatan hasil pembangunan (Mardikanto, 2010). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat memberikan peran terhadap pembangunan wilayahnya terutama pada bidang pariwisata.

Partisipasi masyarakat untuk terlibat dan mengontrol pengelolaan serta pengembangan pariwisata tentunya akan menghadapi berbagai tantangan (Yanes et al., 2019). Menurut (Demartoto, 2009) peran pemerintah dan pemangku kepentingan di sektor pariwisata ikut membina dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata. Sejalan dengan pendapat (Hamzah & Khalifah, 2009) partisipasi masyarakat untuk CBT memerlukan jangka waktu yang panjang dengan tujuan mengatasi kelemahan pada sektor pariwisata. Hal ini karena dominansi masyarakat dalam berpartisipasi masih kurang dalam hal pemahaman dan keterampilan. Hambatan lainnya adalah kurangnya kerja sama dan kesepakatan antara *stakeholder* pariwisata, sehingga tidak adanya kolaborasi antara pihak untuk merealisasikan konsep CBT (Suhaimi et al., 2024). Oleh karena itu, untuk melihat implementasi konsep CBT di kawasan destinasi pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya adalah melihat masing-masing dimensi yang terdapat konsep CBT (Suansri, 2003).

METODE PENELITIAN

Artikel ini didasari oleh penelitian yang dilakukan pada November 2023 di Desa Daulu dan Desa Semangat Gunung, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Kajian ini

menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi untuk mendalami suatu fenomena yang terjadi, sehingga dapat melihat persepsi, motivasi, tindakan dan perilaku yang dideskripsi dalam bentuk narasi (Moleong, 2017). Narasi yang diperoleh menjadi elemen dari pengalaman masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian, sehingga memperoleh makna yang lebih mendalam. Informan pada penelitian ini merupakan kepala desa, ketua kelompok bank sampah, pemilik penginapan, pemilik pemandian air panas, serta beberapa masyarakat yang berdampak terhadap pariwisata. Penentuan informan dilakukan menggunakan pendekatan *accidental sampling* dengan menentukan informan yang secara aksidental terhadap kasus yang tersedia di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik semi struktur. Proses wawancara dilakukan informal yang disesuaikan dengan kondisi dan waktu informan.

Hasil wawancara yang ditemukan dilakukan kodefikasi untuk menemukan kategori dan kata kunci yang sesuai dengan indikator pada masing-masing dimensi CBT yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan politik yang berkembang di masyarakat terhadap perkembangan pariwisata berdasarkan paradigma dan fenomena yang terjadi di destinasi tersebut. Selanjutnya, analisis data penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan terus kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi persepsi masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Dimensi Ekonomi

Melalui kutipan (Suansri, 2003) salah satu implementasi konsep CBT dilihat dari dimensi ekonomi antara lain: pendanaan pengembangan komunitas, terciptanya lapangan pekerjaan, dan tumbuhnya pendapatan masyarakat lokal. Pengembangan komunitas sangat terbatas dalam kegiatan operasional dan diharapkan adanya bantuan dana dari berbagai pihak untuk

mengembangkan komunitas melalui visi dan misi dari komunitas. Implementasi ini sering menjadi suatu kendala karena “sumber dana” menjadi salah satu kendala jika tidak cukup (Rahayu et al., 2016). Pariwisata menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi kemiskinan (Crotti & Mishari, 2017) dan kawasan tersebut menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Hal ini karena tanah di kawasan mengandung belerang, sehingga membuat masyarakat membuka salah satu objek wisata yaitu pemandian air panas. Secara ekonomi, pariwisata memberikan pertumbuhan perekonomian sehingga memberikan pendapatan dan taraf hidup yang lebih baik, hal ini karena masyarakat sudah memahami peluang didapatkan (Pasaribu & Rachmawati, 2022).

Implementasi Dimensi Sosial

Melalui kutipan (Suansri, 2003) salah satu implementasi konsep CBT dilihat dari dimensi sosial antara lain: tingkat kualitas hidup, kebanggaan masyarakat, pembagian peran di masyarakat, dan manajemen organisasi komunitas di kawasan. Perkembangan pariwisata membuat masyarakat meningkatkan kualitasnya, salah satunya menjadi terampil karena adanya sosialisasi berupa edukasi dan pelatihan kepada masyarakat (Reindrawati, 2023) dan memperoleh penghasilan tambahan dari kunjungan wisatawan yang datang. Akan tetapi, tantangan kedepannya adalah masih ada masyarakat yang belum mau berpartisipasi dan masih bertahan di pertanian sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai kepada masyarakat untuk dapat membatasi hambatan dan kelaman yang terjadi (Rahayu et al., 2016).

Perkembangan pariwisata yang terjadi, membuat masyarakat memiliki kebanggaan akan tempat tinggal mereka. Salah satu objek wisata pemandian air panas yaitu TWA Lau Debu-debu memiliki nama yang sudah terkenal baik lokal maupun mancanegara. Masyarakat juga mengharapkan kunjungan wisatawan tidak hanya berfokus pada salah satu objek wisata pemandian air, sehingga

perlu peran pemerintah untuk terlibat serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat (Reindrawati, 2023). Selain itu, peran dari masyarakat terhadap pariwisata didasari dengan keahlian dan kemampuannya, sehingga tidak ada diskriminasi baik antar gender maupun usia. Implementasi dimensi sosial juga berperan karena kehadiran masing-masing komunitas memberikan perhatian kepada masyarakat, sehingga kedepannya dari komunitas perlu memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk terampil kreatif dan inovatif sehingga dapat memperdayakan masyarakat lokal secara berkelanjutan (Nugroho et al., 2022).

Implementasi Dimensi Budaya

Melalui kutipan (Suansri, 2003) salah satu implementasi konsep CBT dilihat dari dimensi budaya antara lain: dorongan masyarakat menghormati budaya dan tradisi dalam pariwisata, pertukaran budaya, dan menanamkan perkembangan budaya. Perkembangan pariwisata yang terjadi memberikan keunikan tradisi dan budaya sebagai penggerak wisata, sehingga menjadi wadah untuk melindungi dan melestarikan akan budaya yang dimiliki tetap terjaga dan dirasakan ke generasi berikutnya (Rusyidi & Fedryansah, 2019). Kebudayaan dan tradisi yang ingin masyarakat lestarian antara lain tarian lima serangkai, seni musik kulcapi dengan gendang-gendang, seni bela diri “*ndikart*” dan melukis *ornament* khas Karo. Implementasi kedepannya, masyarakat menginginkan hal tersebut dapat disandingkan dengan pariwisata. Hal ini sebagai upaya mencegah kekhawatiran masyarakat karena pudarnya nilai-nilai kebudayaan, sehingga dilakukan pelestarian melalui anak-anak untuk dapat berpartisipasi dalam pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019). Dalam berjalannya aktivitas pariwisata, perkembangan pariwisata yang terjadi memberlangsungkan pertukaran budaya dari interaksi masyarakat lokal dengan pengunjung wisatawan. Hal ini karena interaksi dari komunikasi yang

berbeda, sehingga membuat penyesuaian kepada kedua belah pihak.

Implementasi Dimensi Lingkungan

Melalui kutipan (Suansri, 2003) salah satu implementasi konsep CBT dilihat dari dimensi lingkungan antara lain: pengembangan *carrying capacity area*, pola sistem pembuangan sampah yang ramah lingkungan, dan kepedulian terhadap konservasi. Kesadaran masyarakat dengan perkembangan pariwisata yang terjadi, maka langkah awal yang dilakukan menyelesaikan permasalahan kebersihan lingkungan. Hal ini selain untuk mewujudkan sadar wisata kepada masyarakat juga untuk memberikan kenyamanan bersama. Kehadiran kelompok bank sampah, diharapkan kepada masyarakat untuk dapat memilah sampahnya dan disetor kepada bank sampah untuk di daur ulang. Langkah awal yang dilakukan kelompok bank sampah ini, memiliki rencana untuk membangun UMKM baru dan mengharapkan dukungan dari berbagai *stakeholder*. Tentunya hal ini penting untuk membangun kolaborasi antara *stakeholder* agar dapat mengatur pengelolaan sampah yang baik (Reindrawati, 2023).

Perkembangan pariwisata yang terjadi juga ada beberapa dampak yang harus diminimalisir. Kawasan ini belum mengenal pengembangan *carrying capacity area*, hal ini karena kunjungan wisatawan yang tidak menentu di setiap objek wisata pemandian air panas. Masyarakat mengharapkan jumlah pengunjung pariwisata dapat meningkat serta tersebar rata di setiap objek wisata. Selain itu, pentingnya kolaborasi antara *stakeholder* untuk bersama-sama merencanakan pengembangan *carrying capacity area* untuk menjaga kualitas lingkungan menjadi lebih baik (Syarifah & Rochani, 2022). Dampak dari perkembangan pariwisata yang terjadi, sebagian masyarakat yang tidak bergantung pada pariwisata merasakan hasil panen yang tidak baik karena pencemaran air limbah belerang dan tanah yang sudah mengandung belerang. Tindakan konservasi ke lahan-lahan pertanian belum menunjukkan hasilnya dan masyarakat berharap adanya ketegasan

pemerintah untuk menindaklanjuti keresahan yang terjadi dengan bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* untuk berkolaborasi melakukan pelestarian lingkungan untuk kenyamanan seluruh masyarakat dan keberlanjutan pengembangan pariwisata (Rusyidi & Fedryansah, 2019).

Implementasi Dimensi Politik

Melalui kutipan (Suansri, 2003) salah satu implementasi konsep CBT dilihat dari dimensi politik antara lain: peningkatan kekuasaan komunitas, partisipasi masyarakat lokal, dan kejaminan hak masyarakat dalam mengelola sumber daya alam. Perkembangan pariwisata yang terjadi, membuat masyarakat berpartisipasi dan terlibat dalam pariwisata. Potensi yang ditemukan memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi, namun tidak sepenuhnya ingin berpartisipasi dan mengharapkan imbalan secara instan jika ingin berpartisipasi. Hal ini disebabkan karena tingginya krisis kepercayaan di masyarakat. Hambatan yang muncul dari masyarakat menjadi suatu tantangan kedepannya untuk melakukan perubahan yang lebih baik, sehingga perlu kehadiran pemerintah untuk mengawasi (Yanes et al., 2019). Namun, masyarakat menginginkan adanya pendekatan yang tepat dan sesuai kepada masyarakat dari pemerintah untuk dapat meyakinkan masyarakat.

Kejaminan dalam pengelolaan sumber daya alam di kawasan ini. Ketergantungan masyarakat tidak hanya di pariwisata, namun ada di pertanian. Pentingnya kebijakan dari pemerintah yang diharapkan oleh masyarakat untuk dapat merancang, mengawasi, dan mengevaluasi kawasan tersebut untuk memberikan manfaat dan perlindungan kepada masyarakat (Suhaimi et al., 2024). Oleh karena itu, pentingnya kehadiran pokdarwis dan BUMDes pariwisata untuk menjadi lembaga resmi yang mewadahi persoalan tersebut (Reindrawati, 2023). Perkembangan pariwisata yang terjadi di kawasan ini tidak sepenuhnya diwewangi oleh pemerintah desa sebagai pengelola di kawasan destinasi pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya. Diketahui dalam

mengelola retribusi masuk kawasan, pemerintah desa tidak mendapatkan wewenang karena pengelolaannya harus diberikan kepada pemerintah kabupaten yang kemudian akan dikembali kepada masing-masing desa di kawasan destinasi pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya berdasarkan banyaknya jumlah destinasi. Hal ini membuat pemerintah desa kesulitan melakukan pengembangan di wilayahnya untuk pariwisata, sehingga hal ini dapat dimusyawarahkan antara pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi (Reindrawati, 2023).

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian tentang tantangan pengembangan wisata dengan konsep *community based tourism* (CBT) di Kawasan Destinasi Pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya, maka dapat disimpulkan bahwa destinasi wisata di kawasan tersebut sudah mengimplementasikan konsep CBT untuk mengakomodasi pariwisata. Implementasi konsep CBT yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan 5 prinsip dasar menurut UNEP dan WTO. Akan tetapi, ditemukan kekurangan di lapangan sehingga menjadi tantangan dalam melakukan pengembangan wisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Gunung Sibayak dan sekitarnya.

Dalam dimensi ekonomi konsep CBT, perkembangan pariwisata memberikan lapangan pekerjaan melalui objek wisata pemandian air panas dan akomodasi pariwisata lainnya serta memberikan pendapatan kepada masyarakatnya. Namun dalam pengembangan komunitas, pendanaan yang dimiliki belum cukup optimal, selain itu lapangan pekerjaan yang tersedia diperuntukkan kepada kerabat terdekat pemilik usaha dan tidak semua masyarakat merasakan dampak perekonomian dari pariwisata.

Dalam dimensi sosial konsep CBT, perkembangan pariwisata memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakatnya melalui sosialisasi yang

dilakukan. Selain itu, masyarakat setempat memiliki kebanggaan karena adanya salah satu objek wisata pemandian air panas di desanya yang sudah terkenal salah satunya TWA Lau Debu-debu. Dalam partisipasi, tidak ada diskriminasi antara masyarakat karena masyarakat memerlukan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya. Kehadiran komunitas lokal memberikan pengaruh yang baik, terutama bisa mengajak masyarakat berpartisipasi untuk terlibat.

Dalam dimensi budaya konsep CBT, perkembangan pariwisata menjadi dorongan masyarakat untuk menghormati budaya dan tradisi, adanya pertukaran budaya melalui interaksi masyarakat lokal dengan pengunjung wisatawan, dan adanya upaya menanamkan kebudayaan untuk dipertunjukkan kepada pengunjung wisatawan melalui objek-objek wisata yang ada di kawasan tersebut.

Dalam dimensi lingkungan konsep CBT, perkembangan pariwisata memberikan kesadaran masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan. Akan tetapi, indikator konservasi dan pengembangan *carrying capacity area* belum dapat terealisasi dengan baik.

Dalam dimensi politik konsep CBT, perkembangan pariwisata mengajak masyarakat untuk berpartisipasi di bidang pariwisata, namun banyak hambatan dihadapi karena pola masyarakat yang ingin instan. Kejaminan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, masyarakat memiliki hak untuk mengelola menjadi pariwisata dan pertanian, karena dominan lahan dimiliki oleh masyarakat. Akan tetapi, peningkatan kekuasaan komunitas belum optimal dilakukan karena pemerintah desa sebagai lembaga yang tertinggi di kawasan tersebut tidak memiliki wewenang dalam mengelola retribusi untuk melakukan pembangunan di kawasan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, masing-masing dimensi konsep CBT memiliki keunggulan dan kelemahannya ketika konsep CBT diimplementasikan. Keunggulan dari masing-masing dimensi dapat dipertahankan dan dikembangkan

menjadi lebih baik. Namun, masing-masing dimensi harus dapat melakukan evaluasi antara lain: 1) dimensi ekonomi, mengenai pendanaan pengembangan komunitas diperlukan evaluasi dalam mencari dana dengan melakukan aktivitas/aksi yang menjadi daya tarik para investor; 2) dimensi sosial, perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat dengan memahami kebutuhan dan kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam pariwisata agar dapat berkelanjutan dan dibutuhkan tenaga ahli yang profesional; 3) dimensi budaya, untuk melestarikan kebudayaan agar dapat bersanding dengan perkembangan pariwisata perlu disediakan wadah literasi yang diisi dengan tenaga ahli yang profesional sehingga dapat menanamkan dan mengedukasi anak-anak untuk tertarik melestarikan budaya sehingga dapat berkelanjutan; 4) dimensi lingkungan, pentingnya konservasi terutama lahan-lahan pertanian yang sudah terkandung belerang, perlu kolaborasi antara pemerintah dan pengusaha bersama masyarakat untuk mau bekerja sama memperbaiki kondisi lahannya agar bisa digunakan untuk mendukung pariwisata; 5) dimensi politik, tentunya perlu tokoh yang berani mengambil keputusan dan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam pariwisata. Selain itu, dari pemerintah perlunya membentuk kebijakan yang saling sinkronisasi antara *stakeholder* untuk dapat merealisasikan pelaksanaan.

Hasil penelitian mengenai analisis pengembangan wisata dengan konsep CBT melalui persepsi masyarakat diharapkan mampu memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan pariwisata di desa dengan memahami kemampuan dan kebutuhan di masyarakat. Hal ini untuk merealisasikan suatu kebijakan dan pelaksanaan program yang dapat memperdayakan masyarakat lokal agar membangun pariwisata yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, M. D. P., Budhi, M. K. S., Utama, M. S., & Yasa, I. G. W. M. (2019). *the Influence of Government Role,*

- Community Participation and Social Capital on the Quality of Destination and Community Welfare in the Tourism Village of Badung Regency Province of Bali. *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*, 92(8), 235–251. <https://doi.org/10.18551/rjoas.2019-08.26>
- Alfitri, Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2014). Culturally-responsive strategies for resolving social conflict in rural community. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 2267–2277. <https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p2267>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Asyifa, N., Pratama, R. K., Andjanie, I. F., & Furqan, A. (2023). Pendekatan Pariwisata Berbasis Masyarakat / Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Lumajang, Kabupaten Bandung. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 10, 220. <https://doi.org/10.24843/jumpa.2023.v10.i01.p09>
- Connell, D. (1997). Participatory development: An approach sensitive to class and gender. *Development in Practice*, 7(3), 248–259. <https://doi.org/10.1080/09614529754486>
- Crotti, R., & Mishari, T. (2017). *Ttcr_2017*. kemenparekraf.go.id. (2022). *Membangun Ekosistem Desa Wisata Bersama Komunitas*. <https://Kemenparekraf.Go.Id/Ragam-Pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>. <https://kemenparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Membangun-Ekosistem-Desa-Wisata-Bersama-Komunitas>
- Maharani, M. A., Astuti, P., & Marlina, N. (2021). Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Pariwisata Mangrove Demang Gedi Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal LPPM Undip*, 10(3), 439–454. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/31493>
- Murphy, P. E. (1985). A Community Approach. In *Journal of School Health* (Vol. 50, Issue 8). <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.1980.tb03131.x>
- Nugroho, S. S., Nurchayati, Z., & Nurhidayati, H. (2022). *Komodifikasi Pariwisata Berbasis Masyarakat & Kearifan Lokal*.
- Nurhidayati, S. E., & Fandeli, C. (2012). Penerapan Prinsip Community Based Tourism (CBT) Dalam Pengembangan Agrowisata Di Kota Batu , Jawa Timur. *Jejaring Administrasi Publik*, IV(1), 36–46.
- Nurwanto. (2020). Evaluation of The Impact Tourism Development Using the Concept Community Based Tourism in The Tourist Area Tebing Breksi. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 14(2), 109–124.
- Pasaribu, A., & Rachmawati, E. (2022). Pengembangan Wisata Berbasis Masyarakat di Community-Based Tourism Development In The Lawe Gurah Tourism Area , Gunung Leuser National Park. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, 16(1), 15–32. <http://ejournal.kemenparekraf.go.id/index.php/jki/article/view/273/64>
- Putra, M. R. A., Iswara, A. R. P., Fasya, M. N., & Furqan, A. (2023). Penerapan Konsep Community Based Tourism (CBT) di Kampung Wisata Karst Rammang-Rammang, Kabupaten Maros. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(2), 789–808. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i2.2625>
- Rahayu, S., Dewi, U., & Fitriana, K. N. (2016). *Strategi Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. 4(2).

- Reindrawati, D. Y. (2023). Challenges of community participation in tourism planning in developing countries. *Cogent Social Sciences*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2164240>
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 155. <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>
- Suansri, P. (2003). *Community Based Tourism Handbook: REST Project*. https://drive.google.com/file/d/1qs57AXYNAPp8FJjTUG6-2X7Cjwd_PCyG/view
- Suhaimi, S. N., Putri, T. A., Harahap, A., & Furqan, A. (2024). Analisis Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Wisata Mekarsari, Kabupaten Bandung. *Jurnal Industri Pariwisata*, 6(2), 160–173. <https://doi.org/10.36441/pariwisata.v6i2.1555>
- Sulistiyadi, Y., Eddyono, F., & Hasibuan, B. (2017). Pariwisata Berkelanjutan: Pengelolaan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat. In *AURA* (Vol. 01).
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2022). Studi Literatur: Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism Untuk Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1), 109. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i1.19983>
- Timothy, D. J. (1999). Participatory planning a view of tourism in Indonesia. *Annals of Tourism Research*, 26(2), 371–391. [https://doi.org/10.1016/S0160-7383\(98\)00104-2](https://doi.org/10.1016/S0160-7383(98)00104-2)
- United Nation World Tourism Organization. (2019). New UNWTO Publications. In *Unwto* (Issue January).
- Usman, N., Sanopaka, E., Matridi, R. A., Arfa, D., & Sahona. (2022). ANALISIS PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA MODEL COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) DI DESA PENGUDANG Nurbaiti Usman Endri Sanopaka Desmayeti Arfa Raja Abumanshur Matridi Sahona Ilmu Pemerintahan STISIPOL Raja Haji Administrasi Publik STISIP. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Raja Haji*, 3(2), 746–758.
- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/su11092506>

BIODATA PENULIS

Simon Hadi Bangun S. Ars merupakan seorang mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Indonesia.